
BAB III

ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI

3.1 IDENTIFIKASI PERMASALAHAN BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI PELAYANAN

Dalam pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan di Kota Depok tidak terlepas dari berbagai kendala dan permasalahan yang dihadapi, antara lain adalah pemahaman bagi masyarakat tentang arti pentingnya pendidikan. Dalam kehidupan sosial masih muncul berbagai permasalahan yang dirasakan oleh sebagian masyarakat sebagai akibat belum stabilnya kondisi ekonomi yang mengakibatkan anak rawan dan putus sekolah, perkembangan budaya dan teknologi yang dapat mempengaruhi perilaku anak. Di sisi lain peningkatan dan pemerataan sarana dan prasarana pendidikan masih perlu mendapat perhatian yang cukup serius, mengingat daya tampung siswa saat ini masih belum memenuhi akan kenyamanan dan ketenangan dalam proses belajar mengajar.

Sementara itu otonomi daerah telah merangsang perubahan aspirasi dan tuntutan masyarakat terhadap kualitas dan cakupan layanan pendidikan. Di lain pihak kemampuan tenaga pendidik untuk mengembangkan diri secara profesional melalui pelatihan-pelatihan masih perlu ditingkatkan. Pembangunan pendidikan didalamnya mencakup tujuan pendidikan, kurikulum, sarana dan prasarana, guru, metoda pembelajaran, dan murid.

Pembangunan pendidikan dan kebudayaan hingga tahun 2016 menunjukkan keberhasilan yang nyata, namun masih terdapat banyak permasalahan penting yang akan dihadapi pada periode tahun 2016—2021, antara lain:

a. Permasalahan yang dihadapi dalam peningkatan akses dan pemerataan pendidikan adalah:

- 1) Belum terpenuhinya kapasitas daya tampung sekolah;
- 2) Masih banyaknya siswa miskin yang butuh pembiayaan pendidikan;
- 3) Tidak meratanya penyebaran sekolah dan penyebaran penduduk;

- 4) Masih terdapat sebagian masyarakat yang kemampuan daya belinya masih rendah.

b. Permasalahan yang dihadapi dalam peningkatan mutu pendidikan adalah:

- 1) Kurang meratanya kualitas kemampuan profesionalisme guru dalam strategi, metode dan evaluasi pembelajaran belum dapat memfasilitasi siswa dalam meningkatkan kompetensi siswa secara berkelanjutan belum berkembang pada semua sekolah;
- 2) Terdapat kesenjangan dalam fasilitas sarana penunjang pembelajaran pendidikan yang bermutu belum merata pada seluruh sekolah, seperti perpustakaan dan laboratorium serta media pembelajaran;
- 3) Kendali mutu kendali pembelajaran melalui efektivitas kinerja pengawas pembina dan kepala sekolah perlu dikembangkan melalui penetapan kebijakan bersama yang terprogram.
- 4) Jumlah pengawas sekolah tidak berbanding dengan jumlah sekolah dan pendidikan yang dibinanya.

c. Permasalahan yang dihadapi dalam peningkatan relevansi pendidikan adalah:

- 1) Kurangnya sekolah dalam mewadahi siswa yang berprestasi;
- 2) Pembelajaran kepada siswa dalam meningkatkan kompetensi masih bersifat klasikal;
- 3) Kurangnya pembinaan siswa dalam kegiatan ekstra kurikuler maupun intra kurikuler;
- 4) Belum optimalnya kerjasama dengan Dunia Usaha dan Dunia Industri.

d. Permasalahan yang dihadapi dalam peningkatan efisiensi pendidikan adalah:

- 1) Kemampuan manajerial sekolah dalam mengembangkan pelayanan pendidikan belum merata pada seluruh sekolah;
- 2) Belum optimumnya Kegiatan kelompok kerja kepala sekolah, kelompok kerja guru/MGMP dan supervisi kinerja guru;

- 3) Kebijakan kearah pengembangan budaya belajar melalui pengembangan sekolah sebagai organisasi belajar masih lemah.
- 4) Pengembangan inovasi dalam memenuhi kebutuhan perkembangan siswa terdapat permasalahan;
- 5) Belum tersedianya data pendidikan yang akurat dan tepat sebagai acuan dalam perencanaan dan pengawasan hal ini disebabkan karena:
 - Belum adanya tenaga fungsional khusus pendataan;
 - Kurang sadar dan tanggapnya aparat terhadap pentingnya kehadiran data bagi perencanaan dan pengawas;
 - Belum optimalnya sarana dan mekanisme pendataan yang efisien dan efektif yang berbasis teknologi informasi sebagai sumber data primer;
 - Kurangnya dukungan dana operasional untuk pendataan:
- 6) belum optimumnya fungsi Komite Sekolah dan Dewan Sekolah untuk meningkatkan mutu pengorganisasian yang lebih efektif;
- 7) standar mutu kinerja personal dan lembaga belum ditetapkan sebagai bagian dari program lembaga yang juga tercermin dalam implementasi kegiatan dan evaluasi.

3.2 TELAAHAN VISI, MISI, DAN PROGRAM WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA

Visi Walikota Depok terpilih seperti tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Perubahan Kota Depok Tahun 2016—2021 adalah

Visi Kota Depok Tahun 2016—2021
“Kota Depok Unggul, Nyaman, dan Religius”

Kota Depok Unggul, Nyaman, dan Religius dimaknai sebagai berikut:

- Unggul** : menjadi yang terbaik dan terdepan dalam memberikan pelayanan publik, memiliki sumber daya manusia yang sejahtera, kreatif dan berdaya saing yang bertumpu pada ketahanan keluarga.
- Nyaman** : terciptanya suatu kondisi ruang kota yang bersih, sehat, asri, harmonis, berwawasan lingkungan, aman, dan ramah bagi kehidupan masyarakat.

Religius : terjaminnya hak-hak masyarakat dalam menjalankan kewajiban agama bagi masing-masing pemeluknya, yang tercermin dalam peningkatan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, serta kemuliaan dalam akhlak moral dan etika serta berwawasan kenegaraan dan kebangsaan yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.

Untuk mewujudkan visi sebagaimana tersebut di atas, selanjutnya dirumuskan misi guna mencapai visi itu, sehingga diharapkan agar seluruh anggota dan pihak-pihak yang berkepentingan (*stakeholders*) dapat berpartisipasi dan dapat mengenal peran organisasi lebih baik serta mendorong keberhasilannya. Untuk mencapai Visi Kota Depok Tahun 2016—2021 dirumuskan 5 (lima) Misi yang ingin dicapai dalam pembangunan Kota Depok pada tahun 2016—2021 dengan rincian sebagai berikut:

NO	MISI
1.	Meningkatkan kualitas Pelayanan Publik yang Profesional dan Transparan
2.	Mengembangkan Sumber Daya Manusia yang kreatif dan Berdaya Saing
3.	Mengembangkan Ekonomi yang Mandiri, Kokoh dan Berkeadilan
4.	Membangun Infrastruktur dan Ruang Publik yang Merata, Berwawasan Lingkungan dan Ramah Keluarga
5.	Meningkatkan Kesadaran Masyarakat dalam melaksanakan Nilai-nilai Agama dan menjaga Kerukunan antar Umat Beragama serta meningkatkan Kesadaran Hidup Berbangsa dan Bernegara

Disamping visi dan misi tersebut di atas, terdapat 10 program unggulan yang merupakan janji Walikota/Wakil Walikota terpilih pada saat kampanye pemilihan kepala daerah, yaitu:

1. Program Depok peduli Pendidikan (subsidi siswa miskin dan kesejahteraan guru honorer);
2. Pelayanan Puskesmas rawat inap 24 jam di setiap kecamatan dan pembangunan RSUD wilayah timur;

3. Pembangunan taman terpadu di setiap kelurahan (Taman Edukasi, rekreasi, perpustakaan, arena bermain untuk anak dan lansia, *jogging track* dan sarana olah raga, konservasi lingkungan disekitarnya);
4. Pembangunan pusat kreasi rakyat dan panggung budaya kreatif;
5. Revitalisasi pasar tradisional yang bersih dan nyaman dan penyediaan 1000 kios UMKM;
6. Pembangunan sentra industri kreatif (Balai Kreatif, Rumah Kemasan dan Griya Pamer);
7. Peningkatan insentif RT, RW, dan LPM;
8. Peningkatan dana operasional bagi kader posyandu dan posbindu;
9. Pemberian dana insentif bagi pembimbing rohani;
10. Pembangunan alun-alun kota.

Adapun janji Walikota dan Wakil Walikota yang janji Walikota dan Wakil Walikota dengan Dinas pendidikan dapat dilihat pada Tabel 3.1 sebagai berikut:

Tabel 3.1.
Janji Walikota dan Wakil Walikota

No	Janji Walikota	Indikator	Target Indikator Kinerja					
			2016	2017	2018	2019	2020	2021
1.	Bantuan Siswa Miskin (Bantuan Sosial Siswa Rawan DO)							
	SD/MI/SDLB	Siswa miskin yang mendapat bantuan	-	4.713	5.184	5.703	6.273	6.900
	SMP/ MTs		1.506	5.298	5.828	6.411	7.052	7.757
	SMA/SMK/MA		2.298	2.527	2.781	3.059	3.365	3.701
2.	Peningkatan Kesejahteraan Guru Honorer							
	SDN	Jumlah guru honorer	1.122	1.322	1.322	1.322	1.322	1.322
	SMPN		59	216	216	216	216	216
	SMAN/SMKN		54	232	232	232	232	232
3.	Peningkatan Kesejahteraan Guru Swasta							
	PAUD/TK/RA/TPA/TPQ	Jumlah guru swasta	-	8.105	8.105	8.105	8.105	8.105
	PKBM		-	224	224	224	224	224
	SLB		-	96	96	96	96	96
	SD/MI		-	4.693	4.693	4.693	4.693	4.693
	SMP/ MTs		-	3.979	3.979	3.979	3.979	3.979
	SMA/SMK/MA		-	3.078	3.078	3.078	3.078	3.078

Tabel 3.2.
Keterkaitan Misi, Tujuan, dan Sasaran RPJMD Perubahan Kota Depok
Tahun 2016—2021

Visi : Kota Depok yang Unggul, Nyaman, dan Religius			
NO	MISI	TUJUAN	SASARAN
I	Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik yang Profesional dan Transparan	1. Meningkatkan kualitas pelayanan	1. Meningkatnya Kualitas Manajemen Pemerintahan dalam Pelayanan Publik.
II	Mengembangkan Sumber Daya Manusia yang Kreatif dan Berdaya Saing.	1. Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang kreatif dan berdaya saing	1. Meningkatnya kualitas dan akses layanan pendidikan 2. Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat 3. Terbangunnya ketahanan keluarga dan kesejahteraan social 4. Berkembangnya Potensi dan Kreativitas Masyarakat
III	Mengembangkan Ekonomi yang Mandiri, Kokoh, dan Berkeadilan	1. Mengembangkan Kemandirian Ekonomi Lokal yang Kokoh dan Berkeadilan	1. Mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat yang berkualitas 2. Meningkatnya pemerataan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat 3. Meningkatnya ketersediaan dan terjaganya kestabilan harga bahan pangan
IV	Membangun Infrastruktur dan Ruang Publik yang Merata, Berwawasan Lingkungan, dan Ramah Keluarga	1. Meningkatkan Kualitas dan Kapasitas Infrastruktur Transportasi	1. Meningkatnya kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana transportasi
		2. Mewujudkan ruang kota yang nyaman dan ramah keluarga	1. Terwujudnya perencanaan, pemanfaatan dan pengendalian tata ruang kota 2. Meningkatnya kualitas sarana dan prasarana Perumahan dan Permukiman



Visi : Kota Depok yang Unggul, Nyaman, dan Religius			
NO	MISI	TUJUAN	SASARAN
		3. Meningkatkan kualitas dan kapasitas infrastruktur keairan	1. Meningkatnya jaringan pengendalian banjir dan keberlanjutan ketersediaan air
		4. Meningkatkan kualitas lingkungan hidup	1. Meningkatnya kualitas pengelolaan air limbah 2. Terkendalinya tingkat pencemaran lingkungan hidup 3. Terwujudnya Depok sebagai kota bersih (<i>zero waste city</i>) 4. Tersedianya Ruang Terbuka Hijau Yang Nyaman dan Ramah Keluarga
V	Meningkatkan Kesadaran Masyarakat dalam Melaksanakan Nilai-Nilai Agama dan Menjaga Kerukunan Antar Umat Beragama serta Meningkatkan Kesadaran Hidup Berbangsa dan Bernegara	1. Meningkatkan integrasi sosial berlandaskan nilai-nilai agama dan kebangsaan	1. Meningkatnya Kohesi Sosial 2. Meningkatnya Toleransi dalam kehidupan beragama

Sumber : RPJMD Perubahan Kota Depok Tahun 2016—2021

Adapun Visi dan Misi Kota Depok yang menjadi bagian tugas dan fungsi Dinas Pendidikan Kota Depok ada pada misi kedua yaitu “Mengembangkan SDM yang kreatif dan berdaya saing”, dengan Tujuan: Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang kreatif dan berdaya saing serta Sasaran: Meningkatnya Akses dan Kualitas layanan Pendidikan.

3.3 TELAAHAN RENSTRA KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN, DINAS PENDIDIKAN PROVINSI JAWA BARAT DAN KOTA DEPOK

3.3.1 Telaahan Renstra Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan

Rencana Pembangunan Pendidikan Nasional Jangka Panjang (RPPNJP) 2005-2025 menyatakan bahwa visi 2025 adalah Menghasilkan Insan Indonesia Cerdas dan Kompetitif (Insan Kamil/Insan Paripurna). Selain itu, cita-cita dalam pembangunan pendidikan lebih menekankan pada pendidikan transformatif, yaitu pendidikan sebagai motor penggerak perubahan dari masyarakat berkembang menuju masyarakat maju. Pembentukan masyarakat maju selalu diikuti oleh proses transformasi struktural, yang menandai suatu perubahan masyarakat yang menuju masyarakat maju dan berkembang yang dapat mengaktualisasikan potensi kemanusiannya secara optimal.

Dengan mengacu kepada Nawacita dan memperhatikan Visi 2025, serta integrasi pembangunan pendidikan dan kebudayaan, ditetapkan Visi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2019: **“Terbentuknya Insan serta Ekosistem Pendidikan dan Kebudayaan yang Berkarakter dengan Berlandaskan Gotong Royong”**.

Dalam rangka mewujudkan Visi Pendidikan Nasional dan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Misi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan adalah:

1. Mewujudkan Pelaku Pendidikan dan Kebudayaan yang Kuat;
2. Mewujudkan Akses yang Meluas dan Merata;
3. Mewujudkan Pembelajaran yang Bermutu;
4. Mewujudkan Pelestarian Kebudayaan dan Pengembangan Bahasa;
5. Mewujudkan Penguatan Tata Kelola serta Peningkatan Efektivitas Birokrasi dan Pelibatan Publik.

3.3.2 Telaahan Renstra Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat

Program Nasional bidang Pendidikan yang tertuang dalam Renstra Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat antara lain:

1. Program Pendidikan Anak Usia Dini;
2. Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 Tahun;

3. Program Pendidikan Menengah;
4. Program Pendidikan Luar Biasa;
5. Program Pendidikan Nonformal;
6. Program Peningkatan Mutu Pendidikan dan Tenaga Kependidikan;
7. Program Manajemen Pelayanan Pendidikan;
8. Program Pendidikan Tinggi; dan
9. Program Penelitian dan Pengembangan Pendidikan.

Program – Program Prioritas Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat adalah:

1. Peningkatan Akses dan daya saing Pendidikan Tinggi
2. Peningkatan Akses dan Relevansi Pendidikan Menengah dan Vokasi
3. Peningkatan Kualitas dan Kesejahteraan Pendidik dan Tenaga Kependidikan
4. Penuntasan Pendidikan Dasar Sembilan Tahun yang Bermutu
5. Peningkatan Akses dan Mutu PAUD.

3.4 TELAAHAN RENCANA TATA RUANG WILAYAH DAN KAJIAN LINGKUNGAN HIDUP STRATEGIS KOTA DEPOK

Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2015 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Depok Tahun 2012-2032 bahwa kebijakan penataan ruang wilayah Kota Depok terdiri atas:

1. **Kebijakan Pengembangan Struktur Ruang Wilayah Kota**, yang meliputi:
 - a. pengembangan pusat-pusat pelayanan yang berhirarki yang memperkuat kegiatan pendidikan, riset dan inovasi teknologi, perdagangan dan jasa berskala regional;
 - b. pengembangan sistem jaringan prasarana perkotaan yang terdistribusi secara hirarkis;
 - c. pengembangan infrastruktur yang mendukung pengembangan kegiatan pendidikan, riset dan inovasi teknologi, serta perdagangan dan jasa.

2. Kebijakan Pengembangan Pola Ruang Wilayah Kota, yang meliputi kebijakan pengembangan kawasan lindung dan pengembangan kawasan budidaya. Untuk kawasan budidaya ini meliputi: kawasan perumahan, kawasan perdagangan dan jasa, kawasan perkantoran, kawasan peruntukan industri, kawasan pariwisata, kawasan ruang terbuka non hijau, kawasan ruang evakuasi bencana, kawasan ruang bagi kegiatan sektor informal dan kawasan peruntukan lainnya.

Salah satu dari kawasan peruntukan lainnya tersebut merupakan pelayanan umum, dimana di dalamnya terdapat fasilitas pendidikan yang meliputi:

- a. Pendidikan dasar tersebar di Kota Depok;
- b. Pendidikan menengah tersebar di Kota Depok;
- c. Pendidikan tinggi terdapat di Kelurahan Pondok Cina, Kelurahan Pasir Gunung Selatan dan Kelurahan Limo;
- d. Pendidikan luar sekolah tersebar di Kota Depok.

Adapun rencana fasilitas pendidikan ini meliputi:

- a. peningkatan kualitas pendidikan dan pengembangan prasarana dan sarana;
- b. pembangunan fasilitas pendidikan baru tingkat dasar hingga menengah dilakukan tersebar pada lokasi fasilitas umum sekitar kawasan permukiman sesuai dengan tingkat dan lingkup pelayanannya;
- c. pengembangan fasilitas pendidikan terpadu yang terintegrasi dengan kawasan SNADA di Kelurahan Cipayung Jaya;
- d. melakukan relokasi dan penggabungan secara bertahap terhadap fasilitas pendidikan yang tidak memenuhi syarat teknis penyelenggaraan kegiatan pendidikan;
- e. penyediaan fasilitas parkir yang memadai pada fasilitas pendidikan sesuai dengan ketentuan berlaku.

3. Kebijakan Penetapan Kawasan Strategis Kota, yang meliputi pengembangan kawasan strategis kota melalui penetapan kawasan strategis dari sudut pandang ekonomi, kepentingan sosial budaya, kepentingan fungsi dan daya dukung lingkungan hidup.

3.5 PENENTUAN ISU-ISU STRATEGIS

Berdasarkan hasil analisis dapat diketahui bahwa isu-isu strategis yang ada adalah tantangan yang harus diatasi pada pendidikan di Kota Depok antara lain:

a. Tantangan dalam peningkatan akses dan pemerataan pendidikan adalah:

- 1) Pemenuhan kapasitas daya tampung sekolah dengan menambah ruang kelas baru sekolah-sekolah yang ada. Melakukan rehabilitasi kerusakan bangunan sekolah dengan tingkat kerusakan ringan, kerusakan sedang dan melakukan renovasi terhadap bangunan dengan tingkat kerusakan berat;
- 2) Memberikan bantuan sosial siswa miskin kepada siswa yang yang tidak mampu;
- 3) Melakukan pemerataan sebaran sekolah dengan mendirikan sekolah baru di daerah yang jumlah penduduknya padat.

b. Tantangan dalam peningkatan mutu pendidikan adalah:

- 1) Meningkatkan kompetensi tenaga pendidik dengan melakukan pelatihan dalam upaya meningkatkan kompetensi guru untuk mengembangkan strategi, metode dan evaluasi pembelajaran dalam meningkatkan kompetensi siswa secara berkelanjutan;
- 2) Melengkapi fasilitas dan media penunjang pembelajaran pada seluruh sekolah;
- 3) Meningkatkan efektivitas kinerja pengawas pembina dan kepala sekolah melalui penetapan kebijakan bersama yang terprogram;
- 4) Menambah jumlah pengawas sesuai dengan bertambahnya jumlah sekolah yang ada sehingga pengawasan terhadap sekolah binaanya dapat maksimal.

c. Tantangan dalam peningkatan relevansi pendidikan adalah:

- 1) Kurangnya sekolah dalam mewadahi siswa yang berprestasi;
- 2) Melakukan pengembangan metode pembelajaran kepada siswa dalam meningkatkan kompetensi;
- 3) Meningkatkan kegiatan ekstra kurikuler maupun intrakurikuler;
- 4) Menjalin kerjasama dengan dunia usaha dan dunia industri dalam rangka memberikan kesempatan siswa untuk belajar dan praktek langsung di dunia industri

d. Tantangan dalam peningkatan Efisiensi pendidikan adalah:

- 1) Meningkatkan kompetensi manajerial kepala sekolah dalam mengembangkan pelayanan pendidikan sehingga terjadi pemerataan kemampuan manajerial pada seluruh sekolah;
- 2) Optimalisasi peran Kegiatan kelompok kerja kepala sekolah, kelompok kerja guru/MGMP dan supervisi kinerja guru;
- 3) Kebijakan ke arah pengembangan budaya belajar melalui pengembangan sekolah sebagai organisasi belajar masih lemah. Mengembangkan pendidikan berbasis kearifan lokal sesuai dengan kekhasan persoalan sosial dan budaya daerah;
- 4) Optimalisasi pemanfaatan IT dan Sumber Daya Manusia yang memiliki kompetensi di bidang IT;
- 5) Meningkatkan peran dan fungsi Komite Sekolah dan Dewan Sekolah untuk meningkatkan mutu pengorganisasian yang lebih efektif;
- 6) Adanya standar mutu kinerja personal dan lembaga yang baku sebagai bagian dari program lembaga yang juga tercermin dalam implementasi kegiatan dan evaluasi.